

Penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih di DKI Jakarta Melalui Digitalisasi Layanan Pangan dan Inklusi Keuangan

Mohammad Fahreza

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Koperasi Indonesia

mfahreza@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengarahkan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi warga melalui unit layanan yang konkret, antara lain kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage/pegudangan, dan logistik. Di DKI Jakarta yang memiliki 267 kelurahan, Pemerintah Provinsi menargetkan pembentukan 267 koperasi kelurahan agar layanan ekonomi hadir di setiap kelurahan. Namun, data statistik sektoral menunjukkan masih besarnya jumlah koperasi tidak aktif dan penurunan jumlah anggota koperasi di DKI Jakarta pada periode 2020–2022, yang mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola, model bisnis, dan transparansi operasional. Artikel pengabdian masyarakat ini menawarkan desain pendampingan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di DKI Jakarta dengan tema terkini: digitalisasi layanan koperasi untuk ketahanan pangan perkotaan dan inklusi keuangan. Intervensi dirancang berbasis kebutuhan (*needs assessment*) dan kolaboratif (partisipatoris), meliputi: (1) penyusunan SOP tata kelola dan kontrol internal, (2) pengembangan model operasional gerai sembako (stok minimum, strategi harga layanan, kemitraan pemasok lokal), (3) adopsi pembayaran digital melalui QRIS, dan (4) monitoring kinerja berbasis indikator dan data. QRIS dipilih karena hingga Semester I di tahun 2025 telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchants*, dengan mayoritas *merchants* merupakan UMKM, sehingga relevan sebagai infrastruktur transaksi ritel di tingkat kelurahan. Luaran kegiatan mencakup, digitalisasi dan matriks *Key Performance Indicator* (KPI) untuk memastikan replikasi dan keberlanjutan di 267 kelurahan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan; Digitalisasi Koperasi; Tata Kelola; Monitoring Berbasis Data

ABSTRACT

Presidential Instruction Number 9 of 2025 directs the acceleration of the establishment of 80,000 Red and White Village/Sub-district Cooperatives as an instrument for strengthening the economy of residents through concrete service units, including cooperative offices, procurement of basic necessities, savings and loans, clinics, pharmacies, cold storage/warehousing, and logistics. In DKI Jakarta, which has 267 sub-districts, the Provincial Government targets the establishment of 267 sub-district cooperatives so that economic services are present in every sub-district. However, sectoral statistical data shows that there are still a large number of inactive cooperatives and a decrease in the number of cooperative members in DKI Jakarta in the 2020–2022 period, which indicates the need to strengthen governance, business models, and operational transparency. This community service article offers a design for mentoring the Red and White Sub-district Cooperative (KKMP) in DKI Jakarta with the latest theme: digitalization of cooperative services for urban food security and financial inclusion. Interventions were designed based on needs assessment and collaboratively (participatory), including: (1) preparation of SOPs for governance and internal control, (2) development of operational models for grocery stores (minimum stock, service pricing strategies, local supplier partnerships), (3) adoption of digital payments through QRIS, and (4) indicator- and data-based performance monitoring. QRIS was chosen because by Semester I 2025 it had reached 57 million users and 39.3 million merchants, with the majority of merchants being

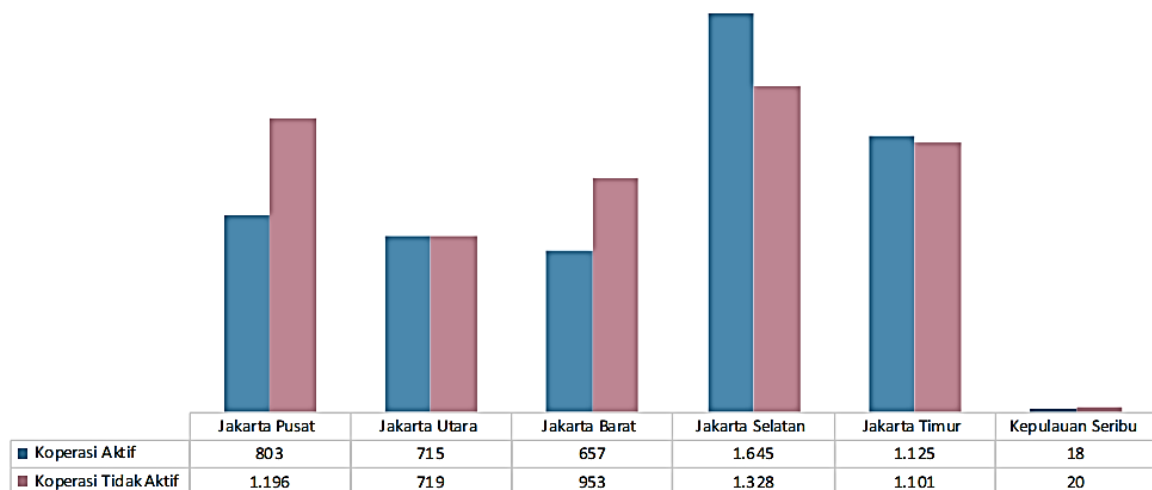
MSMEs, making it relevant as a retail transaction infrastructure at the sub-district level. Activity outputs include digitalization and a Key Performance Indicator (KPI) matrix to ensure replication and sustainability in 267 sub-districts.

Keywords: Food Security; Cooperative Digitalization; Governance; Data-Based Monitoring

I. PENDAHULUAN

Koperasi kembali memperoleh momentum kebijakan nasional ketika agenda percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dengan target 80.000 koperasi yang diproyeksikan menjadi simpul pelayanan ekonomi warga pada level paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. (Presiden Republik Indonesia, 2025; Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025) Dalam kerangka ini, koperasi tidak diposisikan semata sebagai organisasi ekonomi, melainkan sebagai infrastruktur kelembagaan untuk memperkuat akses warga terhadap layanan kebutuhan dasar dan layanan ekonomi produktif. Penekanan kebijakan pada level desa/kelurahan juga mengisyaratkan logika *'last-mile institution'*: koperasi diharapkan hadir sebagai kanal distribusi manfaat yang konkrit, cepat, dan terukur, sehingga partisipasi warga tidak bergantung pada retorika, melainkan pada pengalaman manfaat yang berulang.

Di DKI Jakarta, mandat nasional tersebut diterjemahkan melalui rencana pembentukan 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sesuai jumlah kelurahan yang ada, dan telah diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025; Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Penegasan pada level kelurahan relevan karena kelurahan merupakan arena implementasi yang paling dekat dengan warga kota: tempat kebutuhan konsumsi harian, kerja informal, dan dinamika sosial bertemu secara padat serta bergerak cepat. Dalam ekosistem perkotaan seperti Jakarta, isu ketahanan pangan rumah tangga, volatilitas harga, serta biaya transaksi (waktu, akses, informasi, dan kepercayaan) sering menjadi faktor yang menentukan kesejahteraan. Karena itu, desain KKMP di Jakarta perlu menjawab kebutuhan praktis warga: akses harga dan stok yang lebih terjangkau, mekanisme pelayanan yang ringkas, serta tata kelola yang transparan.



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif DKI Jakarta

Namun, konteks perkotaan juga menghadirkan tantangan implementasi yang khas: ekspektasi layanan warga tinggi, tetapi tingkat kepercayaan pada organisasi kolektif tidak selalu kuat karena pengalaman masa lalu koperasi yang tidak aktif atau tidak memberikan manfaat langsung. Tantangan ini tercermin dalam indikator keaktifan koperasi di DKI Jakarta. Data statistik sektoral menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat kesenjangan nyata antara koperasi aktif dan koperasi tidak aktif di berbagai kota administratif, misalnya Jakarta Pusat (803 aktif; 1.196 tidak aktif), Jakarta Barat (657 aktif; 953 tidak aktif), dan Jakarta Selatan (1.645 aktif; 1.328 tidak aktif) (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Pada sisi partisipasi, jumlah anggota koperasi di DKI Jakarta juga mengalami penurunan dari 292.204 (2020) menjadi 178.663 (2021) dan 118.504 (2022), dengan penurunan signifikan pada 2022 (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Data yang sama menunjukkan bahwa koperasi konsumen mendominasi struktur koperasi (sekitar 70,71% pada 2021), yang secara substantif terkait langsung dengan kebutuhan barang sehari-hari seperti sembako (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa agenda KKMP akan efektif bila dimulai dari unit layanan yang paling '*near-to-life*', yakni layanan pangan dan kebutuhan harian, sambil membangun kembali kepercayaan warga melalui disiplin tata kelola dan bukti manfaat.

Di titik inilah pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis: mempertemukan mandat kebijakan (percepatan, standarisasi, dan akuntabilitas) dengan kapasitas operasional di tingkat kelurahan, sekaligus mengubah kebijakan menjadi praktik organisasi sehari-hari. Inpres 9/2025 menegaskan bahwa aktivitas KD/KMP dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, *cold storage*/pergudangan, dan logistik, dengan penyesuaian pada potensi serta karakteristik setempat (Presiden Republik Indonesia, 2025; Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2025). Untuk DKI Jakarta, strategi implementasi yang realistis adalah memulai dari unit yang paling cepat beroperasi dan mudah dirasakan manfaatnya (misalnya gerai sembako), lalu bertahap memperluas layanan sesuai kesiapan organisasi, jaringan pemasok, dan kapasitas pengendalian internal. Orientasi bertahap ini sekaligus mengurangi risiko '*pendirian tanpa operasi*' dan meminimalkan beban koordinasi pada tahap awal.

Tema terkini yang paling rasional dan berdampak untuk mempercepat kematangan KKMP di DKI Jakarta adalah digitalisasi proses layanan, terutama pada transaksi dan pencatatan usaha. Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchants*, dengan 93,16% di antaranya adalah UMKM; volume transaksi mencapai 6,05 miliar dengan nilai sekitar Rp579 triliun (Bank Indonesia, 2025). Skala adopsi ini menegaskan dua implikasi penting bagi KKMP. Pertama, perilaku digital warga dan pelaku usaha mikro sudah terbentuk, sehingga hambatan adopsi teknologi relatif lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Kedua, digitalisasi transaksi menjadi pintu masuk akuntabilitas: arus kas tercatat, rekonsiliasi lebih mudah, dan pengawasan internal dapat dilakukan berbasis data, bukan semata berbasis kepercayaan personal.

Digitalisasi juga membuka peluang integrasi layanan koperasi dengan ekosistem UMKM setempat. Dominasi UMKM pada basis *merchant* QRIS menunjukkan bahwa KKMP dapat membangun kemitraan pemasok dan *reseller* berbasis kelurahan, sekaligus mendorong formalitas usaha melalui pencatatan sederhana dan disiplin arus kas (Bank Indonesia, 2025). Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami sebagai sekadar pemasangan QRIS atau aplikasi kasir; ia harus dipasangkan dengan perangkat organisasi yang kuat, termasuk SOP kas dan persediaan, standar layanan anggota, mekanisme RAT yang disiplin, serta indikator kinerja yang dapat dipantau. Kombinasi tata kelola dan teknologi ini menjadi fondasi untuk membangun kembali *trust*, mempercepat pembelajaran organisasi, dan mengurangi risiko operasional (misalnya stok habis, pembelian tidak terdokumentasi, atau penyimpangan kas).

Lebih jauh, DKI Jakarta memiliki keunggulan institusional pada budaya data dan keterbukaan informasi. Portal Satu Data Jakarta menegaskan komitmen penyediaan data dalam format yang mudah dicari, diakses, dan digunakan kembali untuk mendorong inovasi publik serta partisipasi warga (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024). Keunggulan ini dapat diintegrasikan ke dalam desain KKMP melalui monitoring berbasis indikator yang sederhana namun konsisten, misalnya

ketersediaan stok barang prioritas, stabilitas harga layanan dibanding harga pasar, volume transaksi, serta pertumbuhan anggota aktif. Monitoring semacam ini penting agar KKMP tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat dievaluasi secara obyektif lintas kelurahan, sehingga praktik baik dapat direplikasi dan kelemahan dapat diperbaiki secara cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperkuat kesiapan organisasi dan operasional KKMP melalui pendampingan partisipatoris berbasis kebutuhan (*needs assessment*), pelatihan tata kelola, penyusunan SOP dan indikator kinerja, implementasi gerai sembako dengan manajemen stok dan pemasok, serta *onboarding* transaksi digital dan pencatatan usaha yang praktis. Fokus ini dipilih karena selaras dengan mandat kebijakan nasional, menjawab tantangan empiris keaktifan koperasi di DKI Jakarta, dan menghadirkan tema yang relevan dengan ekonomi perkotaan saat ini: ketahanan pangan rumah tangga, transparansi layanan publik, serta inklusi keuangan berbasis komunitas (Presiden Republik Indonesia, 2025; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024; Bank Indonesia, 2025). Gambaran tujuan dari kegiatan ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.
Gambaran Tujuan Penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih di DKI Jakarta Melalui Digitalisasi Layanan Pangan dan Inklusi Keuangan

Tujuan	Deskripsi
Tujuan umum	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas digital KKMP agar mampu menjalankan unit usaha pangan (gerai sembako) secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Tujuan khusus	- Memperkuat tata kelola KKMP (struktur, SOP, mekanisme RAT, manajemen keanggotaan, dan kontrol internal). - Mengembangkan model operasional gerai sembako yang adaptif terhadap kebutuhan kelurahan dan selaras dengan mandat layanan KKMP. - Mengakselerasi adopsi transaksi digital (QRIS) dan pencatatan usaha sederhana sebagai fondasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja. - Merancang sistem monitoring berbasis indikator (stok, harga, transaksi, anggota) untuk evaluasi dan replikasi lintas kelurahan.
Sasaran	Pengurus dan pengawas KKMP, perangkat kelurahan, pelaku UMKM pemasok/mitra (sembako dan kebutuhan harian), serta kelompok warga (rumah tangga rentan dan pelaku usaha mikro).

II. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatoris berbasis kebutuhan (*needs assessment*) dan siklus perbaikan berkelanjutan (*plan-do-check-act*) selama tiga hari. Empat tahap utama pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1 Tahap 1: Diagnostik dan Pemetaan Kesiapan
 - a. Diskusi dengan pengurus/pengawas KKMP, dan calon mitra UMKM untuk memetakan kebutuhan pangan warga, pola belanja, serta opsi pemasok.
 - b. Audit sederhana terhadap dokumen kelembagaan, ritme rapat, rencana RAT, kapasitas pencatatan, dan kesiapan adopsi transaksi digital.
 - c. Pemetaan risiko (stok, fluktuasi harga, arus kas, konflik kepentingan, dan risiko reputasi).

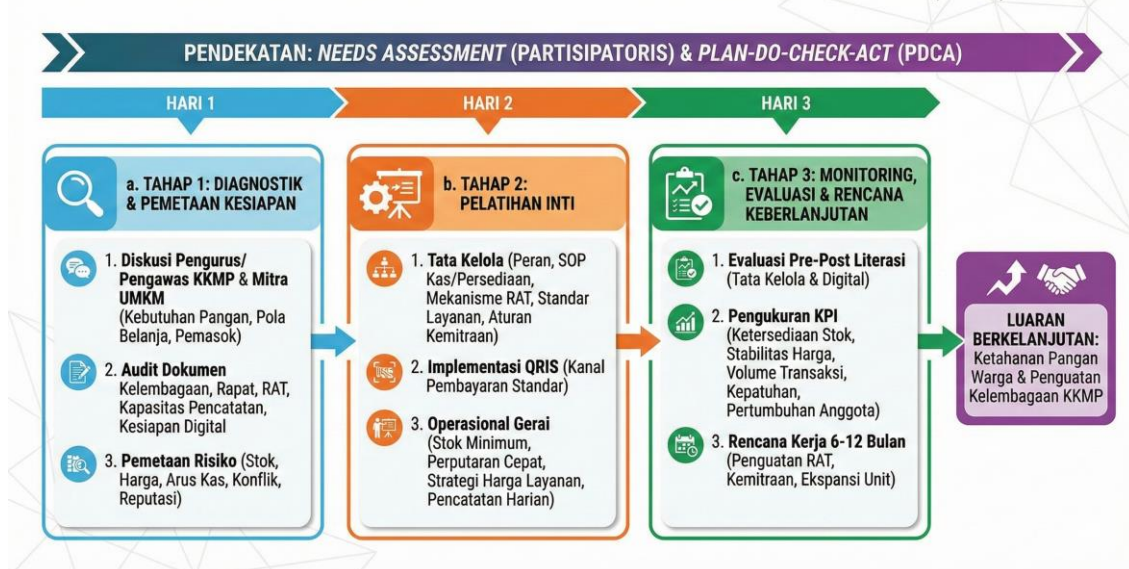
2 Tahap 2: Pelatihan Inti

- Tata kelola: peran pengurus-pengawas, SOP kas dan persediaan, mekanisme RAT, standar layanan anggota, serta aturan kemitraan pemasok.
- QRIS untuk unit gerai sebagai kanal pembayaran standar.
- Operasional gerai: penetapan stok minimum, perputaran barang cepat, strategi harga layanan (lebih rendah dari pasar namun tetap menjaga margin sehat), dan pencatatan harian.

3 Tahap 3: Monitoring, Evaluasi, dan Rencana Keberlanjutan

- Evaluasi pre-post literasi tata kelola dan literasi digital bagi pengurus/pengelola gerai.
- Pengukuran KPI: ketersediaan stok barang prioritas, stabilitas harga, volume transaksi, kepatuhan pencatatan, dan pertumbuhan anggota.
- Rencana kerja 6-12 bulan mencakup penguatan RAT, kemitraan pemasok, serta ekspansi unit layanan secara bertahap.

II. METODE: PENDEKATAN PARTISIPATORIS & SIKLUS PERBAIKAN BERKELANJUTAN (PDCA) - 3 HARI



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain pengabdian menempatkan digitalisasi sebagai alat tata kelola, bukan sekadar adopsi teknologi. Data statistik menunjukkan bahwa tantangan koperasi di DKI Jakarta tidak hanya terkait jumlah, tetapi juga keaktifan dan partisipasi anggota. Ketika koperasi menyediakan layanan yang langsung dirasakan (sembako) dengan mekanisme transaksi yang transparan (QRIS dan pencatatan), koperasi memperoleh peluang meningkatkan kepercayaan warga sekaligus membangun disiplin organisasi.

Selain itu, QRIS menyediakan jejak transaksi yang dapat digunakan untuk analisis arus kas sederhana, pengendalian stok, serta pembuktian kinerja usaha. Dalam banyak kasus UMKM, pencatatan transaksi yang konsisten membantu pembentukan profil keuangan yang pada gilirannya memudahkan akses pembiayaan. Bagi KKMP, nilai strategisnya terletak pada kemampuan mengelola ritel pangan secara profesional dan terukur, sehingga program pembentukan 267 koperasi kelurahan dapat direplikasi dengan standar minimal yang sama namun tetap memungkinkan inovasi lokal.

Salah satu kesalahan umum dalam program penguatan kelembagaan adalah memandang digitalisasi sebagai aksesoris, padahal dalam koperasi digitalisasi harus diposisikan sebagai mekanisme tata kelola (*governance mechanism*). Dalam desain pengabdian ini, QRIS dan pencatatan kas-stok bukan dipasang untuk “modernisasi simbolik”, melainkan untuk menegakkan akuntabilitas harian: setiap transaksi memiliki jejak, setiap stok memiliki rekam pembelian, dan setiap selisih dapat ditelusuri. Statistik QRIS Semester I 2025 menunjukkan penetrasi yang sangat luas: puluhan juta pengguna dan puluhan juta *merchant*, dengan mayoritas *merchant* adalah UMKM (Bank Indonesia, 2025). Hal ini penting karena menunjukkan kesiapan ekosistem: warga tidak lagi asing dengan pembayaran digital, dan UMKM sebagai pemasok/mitra juga sudah terbiasa dengan infrastruktur yang sama.

Pada level operasional, digitalisasi memberikan tiga keuntungan institusional bagi KKMP. Pertama, transparansi arus kas meningkat karena transaksi tercatat dan dapat direkap harian-mingguan tanpa beban administratif yang berat. Kedua, pengendalian internal lebih mudah: pengurus dan pengawas dapat melakukan rekonsiliasi sederhana antara penjualan, saldo kas, dan stok. Ketiga, kepercayaan anggota dapat dibangun secara bertahap karena laporan kinerja usaha memiliki basis data, bukan sekadar narasi. Dalam situasi DKI Jakarta yang menghadapi tantangan koperasi tidak aktif dan penurunan anggota, peningkatan *trust* melalui transparansi menjadi prasyarat untuk memulihkan partisipasi (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Meskipun demikian, digitalisasi tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. QRIS harus dipasangkan dengan SOP (kas, stok, pembelian, otorisasi) dan pembagian peran yang tegas antara pengurus dan pengawas. Tanpa SOP, risiko moral *hazard* dan konflik kepentingan tetap tinggi, hanya saja jejak digital menjadi “rekam masalah”, bukan “alat pencegah masalah”. Karena itu, pendampingan menekankan disiplin organisasi: siapa berwenang membeli barang, bagaimana prosedur penerimaan barang, bagaimana verifikasi faktur, bagaimana penutupan kas harian, dan bagaimana pelaporan ringkas bulanan untuk anggota. Dengan kerangka tersebut, digitalisasi berfungsi sebagai “penguat” (*enabler*) untuk memastikan aturan kerja dijalankan, bukan pengganti aturan kerja.

Skala pembentukan 267 KKMP di DKI Jakarta menuntut orkestrasi pemangku kepentingan yang rapi agar koperasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Secara praktis, orkestrasi dapat diwujudkan melalui tiga lapis ekosistem. Pertama, lapis regulatif dan pembinaan: kelurahan, kecamatan, serta perangkat pembina koperasi perlu memiliki paket standar (SOP minimal, KPI, dan format laporan) agar pembinaan bersifat konsisten lintas wilayah, sejalan dengan mandat percepatan dan penguatan ekosistem dalam Inpres 9/2025 (Presiden Republik Indonesia, 2025). Kedua, lapis pasar dan pemasok: KKMP perlu difasilitasi untuk membangun daftar pemasok terpercaya dan mekanisme pembelian yang efisien, termasuk opsi pembelian bersama antar kelurahan, sehingga daya tawar meningkat dan stabilitas harga lebih terjaga. Ketiga, lapis data dan transparansi publik: ringkasan kinerja dasar (misalnya ketersediaan stok komoditas prioritas dan volume transaksi) dapat dikemas sebagai informasi yang mudah dipahami warga, selaras dengan spirit keterbukaan data daerah melalui Satu Data Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024). Dengan ekosistem tiga lapis ini, pengabdian masyarakat tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu pengurus, tetapi berkontribusi pada pembentukan sistem yang membuat praktik baik lebih mudah dijalankan dan praktik buruk lebih cepat terdeteksi. Pada akhirnya, kombinasi orkestrasi, standardisasi, dan transparansi akan mempercepat pemulihan kepercayaan publik sebuah prasyarat penting mengingat adanya penurunan jumlah anggota koperasi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024).



Gambar 2.
Sesi Pemaparan Materi

Gambaran tentang pengendalian risiko dalam kegiatan transaksi di gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.
Gambaran Tentang Pengendalian Risiko Dalam Kegiatan Transaksi di Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih

Risiko	Mitigasi
Kebocoran kas/rekonsiliasi lemah	Standarisasi transaksi non-tunai (QRIS) dan rekonsiliasi harian dengan laporan penjualan.
Kekosongan stok barang prioritas	Penetapan stok minimum dan kontrak pasok sederhana dengan pemasok lokal; monitoring mingguan.
Konflik kepentingan dalam pengadaan	SOP pengadaan, perbandingan harga, dan pengawasan aktif; notulen keputusan pengadaan.
Adopsi digital rendah	Pelatihan praktis berbasis simulasi; penunjukkan operator gerai; pendampingan dua minggu pertama operasional.
Partisipasi anggota rendah	Program manfaat anggota (harga layanan, poin/insentif), komunikasi rutin, dan penjadwalan RAT yang disiplin.

Dimensi	Indikator	Definisi operasional	Frekuensi
Operasional	Tingkat ketersediaan stok	Proporsi barang prioritas yang tersedia dibanding daftar barang prioritas.	Harian/Mingguan
Harga	Stabilitas harga layanan	Selisih harga gerai terhadap harga pasar rujukan untuk barang utama.	Mingguan

Dimensi	Indikator	Definisi operasional	Frekuensi
Keuangan	Kepatuhan pencatatan	Persentase hari dengan laporan penjualan, pembelian, stok, dan kas lengkap.	Harian
Transaksi	Volume dan nilai transaksi	Jumlah transaksi dan total nilai penjualan gerai.	Harian/Bulanan
Keanggotaan	Aktivasi anggota	Jumlah anggota yang bertransaksi atau menerima manfaat layanan dalam periode tertentu.	Bulanan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Koperasi Kelurahan Merah Putih di DKI Jakarta memiliki dukungan kebijakan nasional melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan agenda pembentukan 267 koperasi kelurahan. Agar inisiatif ini berdaya guna, pendampingan perlu berfokus pada aktivasi organisasi (SOP, RAT, kontrol internal), model bisnis yang relevan (gerai sembako), serta akuntabilitas operasional berbasis digital (QRIS dan pencatatan kas-stok). Pendekatan tersebut memungkinkan layanan ekonomi warga hadir secara cepat, transparan, dan dapat diukur.

Rekomendasi implementatif: (1) mulai dari unit gerai sembako sebagai layanan inti, (2) wajibkan SOP kas-stok dan pelaporan bulanan sederhana, (3) gunakan QRIS sebagai kanal standar untuk memudahkan rekonsiliasi dan audit internal, serta (4) terapkan KPI minimal yang seragam untuk replikasi lintas kelurahan.

Saran

Koperasi Kelurahan Merah Putih di DKI Jakarta memiliki dukungan kebijakan nasional melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan agenda pembentukan 267 koperasi kelurahan. Agar inisiatif ini berdaya guna, pendampingan perlu berfokus pada aktivasi organisasi (SOP, RAT, kontrol internal), model bisnis yang relevan (gerai sembako), serta akuntabilitas operasional berbasis digital (QRIS dan pencatatan kas-stok). Pendekatan tersebut memungkinkan layanan ekonomi warga hadir secara cepat, transparan, dan dapat diukur.

Rekomendasi implementatif:

1. Mulai dari unit gerai sembako sebagai layanan inti
2. Wajibkan SOP kas-stok dan pelaporan bulanan sederhana,
3. Gunakan QRIS sebagai kanal standar untuk memudahkan rekonsiliasi dan audit internal,
4. Terapkan KPI minimal yang seragam untuk replikasi lintas kelurahan.

BIBLIOGRAFI

- ANTARA News. 2025. BI sebut QRIS jadi “entry point” percepat transformasi digital UMKM. <https://www.antaranews.com/berita/5022561/bi-sebut-qr-is-jadi-entry-point-percepat-transformasi-digital-umkm>
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2024. Jumlah desa/kelurahan menurut kabupaten/kota, 2023. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgwIzI%3D/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kabupaten-kota.html>

- Bank Indonesia. 2025. QRIS Jelajah Indonesia 2025 dorong digitalisasi dengan wisata budaya (Siaran Pers No. 27/170/DKom). https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2024. Profil Statistik Jakarta Volume 6, 2024 [PDF]. https://pusat.jakarta.go.id/v2/uploads/statistik/2025/profil-statistik-jakarta-volume-6_file.pdf
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2025. Inilah Inpres 9/2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. https://setneg.go.id/baca/index/inilah_inpres_9_2025_tentang_percepatan_pembentukan_koperasi_desa_kelurahan_merah_putih
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2024. Satu Data Jakarta. <https://www.jakarta.go.id/satu-data>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2025. Pemprov DKI akan bentuk 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih. Berita Jakarta. <https://m.beritajakarta.id/read/144654/pemprov-dki-akan-bentuk-267-koperasi-kelurahan-merah-putih>
- Presiden Republik Indonesia. 2025. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316750/inpres-no-9-tahun-2025>.

